

BAB 1

Pendahuluan

1. 1Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat sebagai negara adidaya memiliki pengaruh luas, tidak terkecuali di Amerika Latin, utamanya Venezuela. Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dengan Amerika Latin yang ditandai dengan adanya “Doktrin Monroe” pada tahun 1823 lalu. Doktrin tersebut yang pada awalnya dijadikan alasan penolakan intervensi negara-negara Eropa untuk mengkoloni benua Amerika yang mana ketika itu Venezuela menganggap AS sebagai pelindung mereka, lama kelamaan menjadi landasan bagi intervensi Amerika Serikat di benua itu. Hubungan kedua negara kerap terjadi pasang surut dan mencapai titik nadir saat Venezuela mulai dipimpin oleh rezim Sosialis Hugo Chavez (1998-2013) dan Nicholas Maduro (2014-sekarang).

AS sendiri memiliki kepentingan besar terhadap Venezuela karena kebutuhan minyaknya dan Venezuela sendiri merupakan eksportir minyak terbesar bagi AS selain negara-negara Timur Tengah. Sejak meninggalnya pemimpin revolusioner Hugo Chavez pada 2013 lalu, Venezuela selalu berada dalam krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan di bawah pemerintahan suksesornya, Nicolás Maduro, dari Partai Sosialis Bersatu Venezuela (Nainggolan, 2018). Keadaan ini memaksa banyak penduduk Venezuela keluar dari negara tersebut dikarenakan keadaan yang sangat tidak menentu. 2019 bisa dikatakan merupakan puncak dari krisis ini. Banyaknya jumlah rakyat yang tak puas dengan kinerja presiden Maduro sepertinya menjadi angin segar bagi AS untuk menampilkan figur yang pro kepada mereka guna melengserkan rezim Sosialis yang telah menguasai negara ini sejak dua dekade lalu (Borger, 2019).

Pada 10 Januari 2019, Nicholas Maduro ditetapkan kembali menjadi presiden Venezuela setelah pemilu yang dianggap penuh kecurangan. Namun sosok Juan Guaido, ketua majelis nasional yang baru diangkat pada 5 Januari lalu, tiba-tiba tampil menjadi figur terdepan dari kalangan oposisi guna menggulingkan presiden Maduro dengan melakukan deklarasi sebagai Presiden interim Venezuela. Deklarasi tersebut dihadiri oleh sebagian rakyat Venezuela yang telah lama resah dengan situasi parah yang melanda negaranya sehingga mereka menginginkan perubahan signifikan dalam pemerintahan, dalam arti pergantian rejim. Persoalan ini penuh dengan pro kontra. Kebanyakan negara di Amerika Latin seperti Brazil, Argentina, dan Chile setuju dengan tampilnya Guaido sebagai Presiden interim Venezuela, namun diantara mereka semua, dukungan utama dan paling menyita perhatian tentu adalah dukungan Amerika Serikat yang pada tanggal 23 Januari 2019.

Namun tak mengherankan, beberapa negara besar yang memiliki orientasi ideologi yang sama seperti China dan Rusia, masih tetap menginginkan Maduro untuk menjadi Presiden walau negara tersebut dilanda krisis yang sangat parah (Rufinaldo, 2019). China sendiri memiliki kepentingan besar terhadap Venezuela dan pemerintahan Maduro sangat bergantung dengan kerjasama dengan China. Sedangkan Rusia, walaupun merasa kurang diuntungkan dengan hubungannya dengan Venezuela, mereka masih menganggap Venezuela merupakan asset besar yang sayang untuk dilepaskan sebagai upaya mereka untuk menjadi kekuatan besar kembali. Bahkan Rosneft, perusahaan minyak Rusia, memiliki kilang minyak sendiri di negara tersebut (Herbst & Marczak, 2019).

Amerika Serikat secara historis memiliki hubungan dekat dengan Venezuela yang merupakan salah satu pemasok minyak utama bagi mereka. Kedua negara telah lama menjalin hubungan diplomatik, dan AS bahkan telah membuka kantor konsulat di Venezuela sejak 1824.

Sejarah panjang politik luar negeri Amerika Serikat ditandai dengan Doktrin Monroe. Doktrin ini merupakan sebuah ultimatum dari AS bagi negara-negara benua Eropa untuk tidak lagi mengintervensi wilayah Amerika. Pada awalnya, Venezuela senang dengan proteksi yang diberikan. Namun lama kelamaan, Venezuela menyadari bahwa itu hanyalah cara AS untuk memperlancar kepentingannya di kawasan. Praktik Doktrin Monroe sendiri sangat kentara di era perang dingin dimana ia menjadi dalih bagi AS untuk menginvasi Teluk Babi di Kuba.

Hari-hari ini, Doktrin Monroe yang disebut telah lama mati itu seakan hidup kembali, terutama dari kalangan konservatif AS. Rex Tillerson, mantan Menteri Luar Negeri pertama di era Donald Trump, menyatakan bahwa Doktrin Monroe masih relevan untuk diterapkan. Hubungan harmonis antara AS dan Venezuela memburuk di bawah pemerintahan Sosialis Chavez dan dilanjutkan oleh Maduro.

Dari kebijakan luar negerinya terhadap Venezuela, sudah jelas bahwa AS memiliki peran yang besar terhadap kondisi politik yang ada di negara tersebut. Layaknya di Irak pada 2002 lalu ataupun Venezuela-nya Chavez di tahun yang sama, intervensi AS dalam upaya penggulingan rezim sangatlah kentara dengan memunculkan figur Guaido da karena kebutuhannya akan minyak Venezuela yang masih cukup tinggi bahkan sampai ada slogan “Dimana Ada Minyak, Disitu Demokrasi Datang”.

1. 2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah; Apa upaya Amerika Serikat dalam mendukung kudeta oposisi di Venezuela 2019?

1. 3 Kerangka Teori

Dalam menjawab rumusan masalah tentang upaya AS mendukung kudeta yang dilakukan Guaido, maka penulis menggunakan konsep yang sekiranya memiliki relevansi tinggi dalam upaya penulis menyusun skripsi ini. Konsep yang digunakan penulis guna menganalisis permasalahan yang ada adalah konsep kepentingan nasional (*national interest*) dalam realisme klasik. Konsep kepentingan nasional, menurut hemat penulis, merupakan pendekatan yang sangat sesuai untuk menggambarkan keadaan di Venezuela tersebut saat ini.

Konsep kepentingan nasional merupakan sebuah konsep klasik kunci yang sangat dominan dalam ilmu hubungan internasional. Konsep kepentingan nasional ini pertama kali muncul dalam teori realisme(Umar, 2014, p. 185). Namun seiring dengan perkembangannya, konsep ini masih sering menjadi bahan perdebatan. memunculkan penjelasan-penjelasan mengenai konsep ini menggunakan teori-teori yang lebih kontemporer sehingga pembahasan mengenai konsep kepentingan nasional ini tidak melulu tentang realisme saja. Jadi cara pandang mengenai kepentingan nasional ini sangatlah beragam sehingga berbagai cara pandang ini saling berkontestasi satu sama lain dalam memandang konsep ini(Manan, 2017, p. 176).

Di dalam buku Scott Burchill, “The National Interest in International Relations Theory”, Burchill menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan pusat dari pengambilan keputusan dalam perdebatan mengenai kebijakan. Dalam politik internasional, konsep kepentingan nasional biasa digunakan dalam dua cara terpisah walaupun saling terkait satu sama lain. Pertama, konsep ini digunakan untuk membentuk perilaku politik dengan berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan, menentang atau mengusulkan kebijakan. Kedua, konsep ini digunakan sebagai alat analisis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menilai kecukupan kebijakan luar negeri suatu negara(Burchill, 2005, p. 2005).

Jika dilihat dari sisi realis, semua bangsa selalu terlibat dalam proses untuk memenuhi atau mengamankan tujuan kepentingan nasional mereka. Kebijakan luar negeri masing-masing negara dirumuskan berdasarkan kepentingan nasionalnya dan mereka selalu bekerja untuk mengamankan tujuannya. Ini adalah hak yang diterima secara universal dari setiap negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya (Burchill et al., 2005, p. 50). Seperti yang dikatakan teoritis realis utama, Hans Morgenthau, bahwa “Arti kepentingan nasional adalah bertahan hidup, yaitu perlindungan identitas fisik, politik, dan budaya dari perambahan oleh negara-bangsa lain” (Hadiwinata, 2017, pp. 103–104).

Morgenthau membagi komponen kepentingan nasional menjadi dua, yaitu. Komponen yang Diperlukan atau Vital dari Kepentingan Nasional dan Komponen Variabel atau Non-vital dari Kepentingan Nasional. Menurut Morgenthau komponen vital dari kepentingan nasional yang dicari kebijakan luar negeri adalah kelangsungan hidup atau identitas. Ia membagi identitas menjadi tiga bagian: Identitas fisik. Identitas politik dan identitas budaya. Identitas fisik termasuk identitas territorial, Identitas politik berarti sistem politik-ekonomi dan identitas budaya berarti nilai-nilai historis yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa sebagai bagian dari warisan budayanya. Ini disebut komponen vital karena ini penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan dapat dengan mudah diidentifikasi dan diperiksa. Sebuah negara bahkan memutuskan untuk berperang demi mengamankan atau melindungi kepentingan vitalnya. Keamanan, dengan demikian, merupakan komponen vital dari kepentingan nasional (Morgenthau, 1948, p. 169).

Komponen non-vital adalah bagian-bagian dari kepentingan nasional yang ditentukan oleh keadaan atau kebutuhan untuk mengamankan komponen vital tersebut. Ini ditentukan oleh sejumlah faktor seperti pembuat keputusan, opini publik, politik partai, kepentingan kelompok, masyarakat adat dan moral. Kepentingan-kepentingan variabel ini adalah keinginan masing-

masing negara yang ingin mereka penuhi. Suatu negara selalu merumuskan keputusan kebijakan luar negerinya dengan tujuan untuk mengamankan dan memperkuat keamanannya. Upaya untuk mengamankan perdamaian dan keamanan internasional, yang sedang dilakukan oleh negara-negara, sedang dilakukan karena saat ini keamanan masing-masing negara berdiri tak terpisahkan terkait dengan perdamaian dan keamanan internasional(Morgenthau, 1948, p. 175).

Untuk mengamankan tujuan dan sasaran dari kepentingan nasionalnya, negara-negara selalu bekerja untuk mengamankan kepentingan nasional mereka dan dengan melakukan itu mereka mengadopsi sejumlah metode. Berikut ini adalah lima metode atau instrumen populer yang biasanya digunakan oleh suatu negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional(Dinesh, n.d.):

1. Diplomasi

Diplomasi adalah salah satu cara yang diterima secara universal untuk mengamankan kepentingan nasional. Diplomasi dilakukan dengan bernegosiasi dengan negara lain untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dari kepentingan nasional negara mereka. Seni diplomasi melibatkan penyajian tujuan dan sasaran kepentingan nasional yang ditujukan untuk dapat membujuk negara lain untuk menerimanya. Para diplomat menggunakan berbagai cara seperti persuasi maupun ancaman sebagai sarana untuk menjalankan kekuasaan dan mengamankan tujuan-tujuan kepentingan nasional sebagaimana didefinisikan oleh kebijakan luar negeri negara mereka. Morgenthau menganggap diplomasi sebagai cara yang paling utama. Namun, semua maksud dan tujuan kepentingan nasional tidak dapat dijamin melalui diplomasi.

2. Propaganda:

Metode penting kedua untuk mengamankan kepentingan nasional adalah propaganda. Ini adalah seni meyakinkan pihak lain tentang tujuan dan sasaran yang diinginkan untuk diamankan. Ini terdiri dari upaya untuk mengesankan pada suatu negara perlunya mengamankan tujuan yang ingin dicapai suatu negara. Propaganda dilakukan oleh suatu negara dengan cara sistematis untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan kelompok tertentu untuk tujuan tertentu.

3. Sarana Ekonomi:

Negara-negara kaya dan maju menggunakan bantuan ekonomi dan pinjaman sebagai cara untuk mengamankan kepentingan nasional mereka. Adanya kesenjangan yang sangat luas antara negara-negara kaya dan miskin memberikan peluang besar bagi negara-negara kaya untuk mempromosikan kepentingan mereka berhadapan dengan negara-negara miskin.

4. Aliansi dan Perjanjian:

Aliansi dan Perjanjian dilakukan oleh dua atau lebih negara untuk mengamankan kepentingan bersama mereka. Perangkat ini sebagian besar digunakan untuk mengamankan kepentingan yang identik dan saling melengkapi. Namun seringkali, konflik kepentingan dapat mengarahkan kepada aliansi dan perjanjian dengan negara-negara yang sepaham guna menghadapi lawan yang sama.

Aliansi dan perjanjian menjadikannya kewajiban hukum bagi anggota aliansi atau penandatanganan perjanjian untuk bekerja untuk mempromosikan kepentingan bersama yang disepakati. Sifat aliansi tergantung pada sifat kepentingan yang dicari untuk diamankan. Dengan demikian, aliansi itu bersifat militer atau ekonomi.

5. Cara Paksaan/ Koersif

Cara ini dapat digunakan oleh suatu negara untuk memaksa negara lain untuk menerima tindakan tertentu atau untuk menahan diri dari tindakan yang dianggap berbahaya oleh negara. Negara-negara besar seringkali menggunakan cara-cara paksaan setiap kali mereka merasa perlu dilakukan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kekuatan militer masih dianggap sebagai bagian utama dari kekuatan nasional dan sering digunakan oleh suatu negara untuk mengamankan tujuan dan sasaran yang diinginkan, terutama digunakan dengan kekuatan militer.

Semua cara ini digunakan oleh semua bangsa untuk mengamankan kepentingan nasional mereka. Negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengamankan kepentingan nasional mereka dan mereka memiliki kebebasan untuk memilih cara yang diperlukan untuk tujuan ini (Bakri, 2017, p. 44).

Jika menilik teori ini, sangat jelas sekali bahwa upaya-upaya Amerika Serikat dalam kudeta oposisi Venezuela adalah untuk mencapai kepentingan nasionalnya yakni menjadikan Venezuela sebagai sekutu, mengubah rezim sosialis ke demokratis, dan terutama untuk memudahkan AS bermitra dengan Venezuela, terlebih dalam impor minyak mereka terhadap negara itu, juga untuk memperluas hegemoni di kawasan. Dari kelima metode yang penulis paparkan diatas, Amerika Serikat menggunakan semua metode itu dalam upayanya menggulingkan Nicolas Maduro agar digantikan dengan Juan Guaido yang mereka sponsori.

1. 4 Hipotesa

Dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya agar Venezuela jatuh ke rezim oposisi, Amerika Serikat melakukan 3 upaya;

1. AS mendukung penuh Juan Guaido dengan mengakuinya sebagai Presiden Interim Venezuela. Ini merupakan upaya awal agar Venezuela jatuh ke rezim yang pro terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat.
2. Amerika Serikat memberikan berbagai bantuan kemanusiaan terhadap Venezuela. Bantuan diberikan Amerika Serikat untuk memberi tekanan pada rezim Maduro sehingga membuat pemerintahan Maduro terkesan abai terhadap kondisi negara sehingga negara itu memerlukan bantuan internasional, terutama Amerika Serikat.
3. Memberikan berbagai sanksi termasuk sanksi ekonomi.

1.5 Jangkauan penelitian

Penelitian ini merujuk kepada kondisi Venezuela sejak 2014 dimana terjadi krisis ekonomi akut yang kemudian menghadirkan protes besar-besaran terhadap Presiden Maduro di 2017 akibat krisis yang melanda negara. Namun, penulis merasa perlu untuk menambahkan profil dan sejarah Venezuela secara singkat, juga tentang keterlibatan AS di kawasan tersebut yang tak lepas dari apa yang dinamakan dengan “Doktrin Monroe” yang diikrarkan pada tahun 1823 oleh Presiden kelima AS, James Monroe. Doktrin Monroe sendiri merupakan suatu hal yang fundamental terkait intervensi AS di kawasan Amerika Latin. Namun penelitian ini memfokuskan pada peristiwa politik yang terjadi pada awal tahun 2019 sejak terpilih kembalinya Nicholas Maduro sebagai Presiden pada 10 Januari lalu, yang diikuti oleh berbagai dinamika yang ada termasuk deklarasi Juan Guaido sebagai presiden Venezuela pada 23 Januari 2019 hingga saat ini.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian mengenai peran Amerika Serikat dalam upaya kudeta yang dilakukan oleh Guaido ini, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan sumber data utama melalui pustaka literatur. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, media tulis, serta sumber-sumber elektronik lainnya. Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi secara rinci dalam menggambarkan gejala maupun praktik yang ada terhadap masalah yang sedang diteliti. Kemudian teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yaitu dengan menganalisis data sekunder yang berasal dari hasil interpretasi data primer (Jatmika, 2016).

1. 7 Sistematika Penulisan

BAB 1: Pendahuluan

Pada Bab I penulis akan membahas mengenai pendahuluan. Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesa, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: Dinamika Hubungan AS dan Venezuela

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang dinamika hubungan kedua negara. Dinamika kedua negara tersebut sudah terjalin sejak lama bahkan sejak Venezuela merdeka. Penulis ingin memaparkan tentang doktrin Monroe (Valenta, 2019) sebagai landasan politik luar negeri AS di Amerika Selatan dan kemudian dilanjutkan dengan dinamika hubungan kedua negara sejak 2017. Perbedaan ideologi yang telah mengantarkan keduanya kepada sesuatu yang

tidak berkesudahan. Di situasi seperti sekarang pun juga kentara bahwa ideologi masih memainkan peranan penting dalam dinamika hubungan kedua negara.

BAB 3: Krisis Ekonomi, Sosial, dan Politik Venezuela Era Nicholas Maduro (2014-2019)

Pada bab ini penulis ingin menjelaskan tentang krisis ekonomi di negara ini yang telah berlangsung sejak 2014 lalu hingga sekarang. Krisis ekonomi yang sudah mulai ada sejak akhir masa pemerintahan Hugo Chavez ini sangat sulit ditanggulangi karena ketergantungan terhadap minyak yang terlalu besar. Keadaan Venezuela semakin memburuk dibawah pemerintahan Nicholas Maduro. Bahkan tahun 2017 lalu terjadi protes besar-besaran akibat krisis yang melanda negara. Rakyat menuntut adanya perbaikan. Krisis ekonomi tersebut merambat menjadi krisis politik di tahun 2018 dan 2019 ini. Tak dapat dipungkiri, kondisi inilah yang memberanikan AS untuk melakukan kudeta terhadap Maduro seperti yang pernah dilakukan terhadap Hugo Chavez di tahun 2002.

BAB 4: Pembahasan

Dalam bab ini penulis membahas dan menganalisis kasus yang ada. Penulis akan menjelaskan peran penting AS dalam konstelasi politik global terutama terhadap Amerika Latin dan ingin menelisik peran mereka dalam krisis ekonomi dan juga krisis kepemimpinan yang ada di Venezuela. Peran Amerika Serikat sungguh kentara. Paska Guaido melakukan deklarasi, AS langsung memberikan dukungan resminya kepada Guaido yang kemudian diikuti oleh sekutu-sekutunya. AS tentu tidak ingin melepaskan Venezuela yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia jatuh ke tangan rivalnya, China dan Rusia, sehingga AS memutuskan untuk memberikan dukungan terhadap oposisi guna melengserkan rezim otoriter Maduro guna menghadirkan demokrasi di negara tersebut. Disini kasus-kasus yang ada tersebut dianalisis menggunakan teori

yang telah penulis pilih dan penulis berusaha membangun argumen yang kuat dan teoritis guna menjadikannya pembahasan yang komprehensif yang dibutuhkan dalam suatu penulisan skripsi. Sudah tentu di bab ini diterangkan tentang korelasi antara teori, dan peran AS dalam kudeta oposisi Venezuela sekarang dan kemungkinannya kedepan yang tergantung oleh konstelasi politik dalam negeri Venezuela sendiri.

BAB 5: Kesimpulan

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir dari pembahasan masalah.